

EFEKTIVITAS DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI SMA NEGERI 1 LAKEA

EFFECTIVENESS OF DECENTRALIZED EDUCATION IN IMPROVING PROFESSIONALISM OF TEACHERS IN SMA NEGERI 1 LAKEA

¹Rustam S. Mangale, ²Surni Kadir, ³Rahmawati

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email :rustammangale@gmail.com)

(Email :surni.kadir@gmail.com)

(Email :rahmawati.rahmawati@gmail.com)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea dengan pokok pembahasana bagaimana deskripsi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea? dan bagaimana implikasi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea. Tujuan penelitian ini untuk mengetahudeskripsi dan implikasi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profdesionalisme guru di sekolah tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian skripsi ini yaitu: deskripsi Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Lakea: (1) Desentralisasi pendidikan merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikannya, lalu daerah melimpahkan kepada masing-masing sekolah (2) Pemerintah pusat tetap mengontrol pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masing-masing sekolah melalui akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh BAN-SM (3) Aspek-aspek yang menjadi kewenangan sekolah dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan yakni: (a) Perencanaan dan evaluasi program sekolah dalam hal ini sekolah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan cara merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru, misalnya mengutus guru untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan merencanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan guru dan mengevaluasi berbagai perencanaan kegiatan program sekolah (b) Aspek pengelolaan proses belajar, memberikan kewenangan kepada masing-masing guru untuk mengelola proses pembelajaran pada mata pelajaran yang dipegangnya dan kepala sekolah melukan supervisi kepada guru untuk mengevaluasi dan membimbing pelaksanaan proses pembelajaran guru tersebut (c) Aspek pengelolaan ketenagaan, SMA Negeri 1 Lakea mengelola 25 orang guru dan 3 orang tenaga administrasi, pengelolaan yang dilakukan misalnya memberikan guru mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya, dan mengutus guru sebagai perwakilannya dalam kegiatan seminar mapun workshop (d) Aspek pengelolaan keuangan, sekolah mengelola dana BOS dengan prosedur sesuai dengan aturan penggunaan dana tersebut yakni sebagai operasional sekolah, misalnya mengupayakan pembayaran honor guru honorer yang tidak pernah terlambat dibayarkan. Implikasi Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Lakea: (1) Program sekolah dalam meningkatkan profesionalisme dapat terlaksana dengan baik (2) Masing-masing guru berupaya meningkatkan pengelolaan proses belajarnya sebagai implikasi dari pelaksanaan supervisi (3) Sekolah memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan (4) Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah dapat memotivasi guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kata kunci : Desentralisasi pendidikan, profesionalisme guru

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of education decentralization in improving the professionalism of teachers in SMA Negeri 1 Lakea with the subject of how to description of decentralized education in improving the professionalism of teachers in SMA Negeri 1 Lakea? And how the decentralized implications of education in improving the professionalism of teachers at SMA Negeri 1 Lakea. The purpose of this research is to discover the description and implications of the decentralized education in improving teacher profdesionalism in the school.

To answer this, the study used qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation, as well as using data analysis techniques through data reduction, data presentation, data verification and Withdrawal conclusions. Research results of this thesis: Description of decentralized education in improving the professionalism of teachers in SMA Negeri 1 Lakea: (1) Decentralized education is the granting of authority to the District to manage its education, then the district Bestowed on each school (2) The central government continues to control the education organized by the local government and each school through a national accreditation conducted by the BAN-SM (3) aspects that become School authority in implementing education Desentralisai namely: (a) planning and evaluation of school programs in this case schools are trying to improve the quality of education by planning activities that can improve the The professionalism of teachers, such as sending teachers to participate in the teachers ' deliberations (MGMP) and planning technical guidance to improve the skills of teachers and to evaluate a variety of planning activities of school programs (b) aspects of management The learning process, authorizing each teacher to manage the learning process in the subjects he held and the headmaster of the supervision to the teacher to evaluate and guide the implementation of the learning process. The teacher (c) aspect of the management of the manpower, SMA Negeri 1 Lakea manages 25 teachers and 3 people administrations, the management is done for example giving teachers a subject that suits his expertise, and sends teachers as Representatives in the Seminar activities Mapun workshop (d) Aspects of financial management, the school manages the BOS funds with the procedure in accordance with the rules of use of the fund that is the operation of the school, e.g. seeking payment of the teacher's honor An honorary that is never late paid. The implications of education decentralization in improving the professionalism of teachers in SMA Negeri 1 Lakea: (1) The school Program to improve professionalism can be carried out well (2) Each teacher seeks to improve process management Learning as an implication of the implementation of supervision (3) The school has an educator in accordance with the needs and (4) the financial management implemented by the school can motivate teachers to perform their duties well.

Keywords: *decentralized education, professionalism teacher*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Ada dua buah konsep pendidikan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu belajar dan pembelajaran. Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik. Dalam proses belajar mengajar (PBM) terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedangkan pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat pesanannya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Meningkatkan mutu pendidikan adalah sebuah keharusan, untuk mengungkapkannya membutuhkan adanya upaya perbaikan di semua sektor yang mendukung dunia pendidikan itu sendiri. Prasyaratnya adalah adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, diantaranya gedung pendidikan yang representatif, fasilitas perpustakaan, sistem pendidikan, anggaran yang cukup, dan guru yang profesional sebagai tenaga pendidik.

Dimulai semenjak Indonesia mulai memasuki era reformasi semua lini sendi birokrasi di Indonesia juga tidak luput dari reformasi. Dari dulu yang kesemua lini bernafaskan sentralistik sedikit demi sedikit bergeser pada paradigma desentralistik. Demikian juga yang terjadi pada

sistem pendidikan kita yang juga memaksa diri untuk mengikuti era desentralisasi. Pelimpahan wewenang untuk mengatur sistem sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melihat hasil perkembangannya.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan memiliki peran penting bagi peningkatan kreativitas guru, karena melalui desentralisasi pendidikan guru dapat mengembangkan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses desentralisasi menuai harapan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Nafas partisipasi dari berbagai pihak untuk kesuksesan bersama menghipnotis dan mengamini perkembangan ini. Dari pihak penyelenggara diberi wewenang untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Selebihnya masyarakat diberi hak dan diberi kesempatan aktif untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Selain itu masyarakat juga berhak mengontrol dan mengawasi proses yang berlangsung.

Kabupaten Buol merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran desentralisasi pendidikan dari Pusat. Untuk melihat sejauh mana efektifitas desentralisasi pendidikan terhadap profesionalisme guru di daerah, perlu dilaksanakan penelitian. SMA Negeri 1 Buol sebagai ujung tombak proses pendidikan secara desentralisasi, berupaya mengembangkan lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam desentralisasi pendidikan, yang mencakup aspek: perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan proses belajar, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dan masyarakat dan pengelolaan iklim sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan SMA Negeri 1 Lakea. Oleh karena itu, penulis tertarik melaksanakan proses penelitian untuk melihat secara langsung efektifitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana deskripsi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea? Bagaimana implikasi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Lakea Kabupaten Buol. Penulis memilih lokasi tersebut, karena SMA Negeri 1 Lakea termasuk salah satu lembaga pendidikan di daerah (khususnya Buol) yang menjadi sasaran desentralisasi pendidikan. Adapun alasan lainnya yakni, sekolah tersebut mudah diakses oleh penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan proses penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas makna dari indikator-indikator yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator yang lain. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisis data dengan mengacu konsep dari Hubberman dan Milles dalam Sugiyono, yaitu komponen dalam analisis data interactive.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Desentralisasi Pendidikan

Secara etimologis “istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin *de*, artinya lepas dan *centrum*, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat”¹. Pada awalnya istilah desentralisasi digunakan dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Sedangkan pengertian desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah: Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah².

Menurut Hurst dalam Nugroho pengertian desentralisasi pendidikan “*the decentralization process implies the transfer of certain function from small group of policy-makers to a small group of authorities at the local level*”³, yang artinya desentralisasi merupakan proses penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari sekelompok kecil pembuat kebijakan kepada satu kelompok kecil pemegang kekuasaan pada tataran lokal. Definisi Hurst tersebut telah menggambarkan dengan jelas proses penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan menurut Chau dalam Nugroho, “desentralisasi pada konsep pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya”⁴. Menurut Rondinelli, terdapat empat bentuk desentralisasi sebagai berikut:

- a. Dekonsentrasi adalah pembagian sebagian kewenangan atau tanggung jawab administratif ke tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pusat, pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke kantor diluar ibukota atau pemerintahan pusat.
- b. Delegasi merupakan pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada dibawah pengawasan pemerintah pusat.
- c. Devolusi merupakan transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi daerah.
- d. Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangandari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat⁵.

Keempat bentuk tersebut “yang menjadi model desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah bentuk yang ketiga, yaitu model devolusi”⁶. Model ini memiliki konsekuensi tanggung jawab atas apa yang diputuskan termasuk

¹Andik Kasnata, *Desentralisasi Pendidikan* (online) (<http://andikkasnata.blogspot.com/2014/12/makalah-desentralisasi-pendidikan-di.html>), diakses tanggal 5 Januari 2019

²Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, (Bandung: Pustaka Educa, 2015), h. 55

³Riant Nugroho. *Desentralisasi Tanpa Revolusi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 2

⁴*Ibid.*

⁵Ara Hidayat dan Imam Machali, *op.cit*, h. 54

⁶*Ibid*, h. 55.

berimplikasi pada keuangan dan manajemen dibebankan pada kabupaten dan kota. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada pelayanan dasar di daerahnya seperti di bidang pertanahan, pertanian, pendidikan, kebudayaan dan yang lainnya.

Sedangkan desentralisasi pendidikan merupakan gabungan dari dua kata yaitu antara desentralisasi dan pendidikan. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian desentralisasi pendidikan, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Burnett e.al yang dikutip oleh M. Sirozi, desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas⁷.
- b. Abdul Halim dalam M. Sufyarman mengartikan desentralisasi pendidikan yaitu terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.
- c. Menurut Sufyarman, desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan⁸.

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah beserta masyarakat, pengelola dan pengguna pendidikan itu sendiri, untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan dengan mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional, hal ini dilaksanakan agar setiap daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Menurut Jalal dan Musthafa dalam M. Sirozi, ada dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait dalam desentralisasi pendidikan.

Konsep pertama berkenaan dengan isu umum desentralisasi, yaitu transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Dalam konsep ini, pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah beserta dana yang dibutuhkan untuk membiayai tanggung jawab yang dibebankan. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan masing-masing pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah yang memutuskan berapa banyak dan belanja pendidikan apa yang diperlukan. *Konsep kedua* berkenaan dengan pergeseran berbagai keputusan pendidikan dari pemerintah ke masyarakat. Ide dasar di balik konsep ini, bahwa masyarakat harus lebih tahu dan memutuskan sendiri program pendidikan yang dikehendaki karena masyarakatlah yang akan memanfaatkannya⁹.

Dengan dua konsep tersebut maka lebih dijelaskan kembali bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada semacam konsensus global, khususnya di kalangan negara berkembang, bahwa melakukan desentralisasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, maka desentralisasi pendidikan melibatkan pendelegasian keputusan tentang beberapa faktor.. Jalal dan Musthafa yang dikutip oleh M Sirozi menjelaskan bahwa ruang lingkup desentralisasi pendidikan mencakup:

⁷M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2015), h. 83.

⁸M. Sufyarman, *Kapita selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 83.

⁹*Ibid.*

- a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah, sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal dan evaluasi diri.
- b. Pengelolaan kurikulum, Sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.
- c. Pengelolaan proses belajar, Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan tehnik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.
- d. Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan, sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.
- e. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.
- f. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.
- g. Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni telah didesentralisasikan.
- h. Hubungan sekolah dan masyarakat, adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang sudah merupakan kewenangan sekolah, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya dan
- i. Pengelolaan iklim sekolah, Iklim sekolah yang kondusif untuk melakukan kegiatan akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif.¹⁰

Dengan demikian, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya

Tinjauan tentang Profesionalisme Guru

Kata *profesionalisme* berasal dari kata profesi yang berarti “suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu”¹¹. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dipersiapkan untuk pekerjaan tersebut.

Merujuk kata profesional tersebut, dapat dipahami bahwa kata profesional orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru

¹⁰*Ibid*, h. 235

¹¹*Iskandar Agung, Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), h. 57*

yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik.

Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. “Profesionalisme yang berdasarkan keterbukaan dan kebijakan terhadap ide-ide pembaharuan itulah yang akan mampu melestarikan eksistensi madrasah atau sekolah”¹². Adapun pengertian profesionalisme guru yaitu: Profesionalisme guru adalah suatu tingkat penampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sebagai guru yang didukung dengan keterampilan dan kode etik. Eksistensi seorang guru adalah sebagai pendidik profesional di sekolah, dalam hal ini guru sebagai *uswatun hasanah*, jabatan administratif, dan petugas kemasyarakatan¹³.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, dapat digunakan bermacam-macam metode tergantung dari sifat dan masalah yang diteliti. Metode penelitian memiliki peran penting dalam menentukan arah kegiatan untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan. Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang teliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah “suatu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga akan mengungkapkan fakta-fakta serta tidak menggunakan dan melakukan pengujian hipotesa”.¹⁴ Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan sistematis mengenai subyek yang diteliti Jenis Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam mengenai fenomena serta untuk memperoleh diskripsi yang utuh tentang upaya sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa di SMPN 2 Lakea dalam tinjauan Pendidikan Islam.

Deskripsi Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Lakea:

1. Desentralisasi pendidikan merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikannya, lalu daerah melimpahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengelola dan melaksanakan pendidikannya
2. Pemerintah pusat tetap mengontrol pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masing-masing sekolah melalui akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh BAN-SM

¹²Alimudin, *Profesionalisme Guru* (online) (<http://alimudinmakalah.blogspot.com/2009/04/profesionalisme-guru.html>), diakses tanggal 24 Januari 2019

¹³Abu Bakar Yunus dan Syarifan Nurjan, *Profesi Keguruan*, (Surabaya: Aprinta, 2015), h. 1

¹⁴Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016), h. 20.

3. Aspek-aspek yang menjadi kewenangan sekolah dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan yakni: (a) Perencanaan dan evaluasi program sekolah dalam hal ini sekolah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan cara merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru, misalnya mengutus guru untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan merencanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan guru dan mengevaluasi berbagai perencanaan kegiatan program sekolah (b) Aspek pengelolaan proses belajar, memberikan kewenangan kepada masing-masing guru untuk mengelola proses pembelajaran pada mata pelajaran yang dipegangnya dan kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru untuk mengevaluasi dan membimbing pelaksanaan proses pembelajaran guru tersebut (c) Aspek pengelolaan ketenagaan, SMA Negeri 1 Lakea mengelola 25 orang guru dan 3 orang tenaga administrasi, pengelolaan yang dilakukan misalnya memberikan guru mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya, dan mengutus guru sebagai perwakilannya dalam kegiatan seminar maupun workshop (d) Aspek pengelolaan keuangan, sekolah mengelola dana BOS dengan prosedur sesuai dengan aturan penggunaan dana tersebut yakni sebagai operasional sekolah, misalnya mengupayakan pembayaran honor guru honorer yang tidak pernah terlambat dibayarkan.

Implikasi Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Lakea:

- a. Program sekolah dalam meningkatkan profesionalisme dapat terlaksana dengan baik
- b. Masing-masing guru berupaya meningkatkan pengelolaan proses belajarnya sebagai implikasi dari pelaksanaan supervisi
- c. Sekolah memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan
- d. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah dapat memotivasi guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Iskandar. *Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014).

Alimudin, *Profesionalisme Guru* (online) (<http://alimudinmakalah.blogspot.com/2009/04/profesionalisme-guru.html>), diakses tanggal 24 Januari 2019

Ervannudin, Nur dan Bimo Wahyu Widodo, *Desentralisasi Pendidikan dan Peran aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, Universitas Negeri Surakarta

Hidayat, Ara dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Bandung: Pustaka Educa, 2015.

Kasnata, Andik. *Desentralisasi Pendidikan* (online) (<http://andikkasnata.blogspot.com/2014/12/makalah-desentralisasi-pendidikan-di.html>), diakses tanggal 5 Januari 2019

Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.

Nugroho. Riant. *Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2015.

Sufyarman, M. *Kapita selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016.

Yunus, Abu Bakar dan Syarifan Nurjan, *Profesi Keguruan*, Surabaya: Aprinta, 2015.